

**ANALISIS PERAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA  
PERIKANAN DI INDONESIA**

***ANALYSIS OF THE ROLE OF LAW IN THE MANAGEMENT OF FISHERIES  
RESOURCES IN INDONESIA***

**Robiyanoor**

*Program Studi Budi Daya Ikan, Politeknik Seruyan  
Jl. A Yani Kuala Pembuang II, Seruyan Hilir, Seruyan , Kalimantan Tengah, 74215  
Email: robiyanoor120131@gmail.com*

Diterima : 2 Januari 2023

Disetujui : 11 Februari 2023

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian yang mencakup tinjauan pustaka dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan hukum yang ada saat ini belum efektif dalam mencegah over-eksploitasi sumberdaya perikanan dan tidak memberikan insentif bagi pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkualitas. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mengoptimalkan peran hukum dalam pengelolaan sumberdaya perikanan agar dapat menjaga keberlangsungan sumberdaya perikanan dan memperkuat pembangunan ekonomi. Hasil penelitian bahwa peran hukum sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia. Rekomendasi yang diberikan meliputi perbaikan regulasi hukum yang ada dan pengembangan sistem insentif bagi pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkualitas. Implementasi dari rekomendasi ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan sumberdaya perikanan dan memperkuat pembangunan ekonomi.

**Kata kunci:** Hukum, Sumberdaya perikanan, Pengelolaan, Indonesia, Analisis.

***Abstract***

*This study aims to analyze the role of law in the management of fishery resources in Indonesia. This study was conducted using a research methodology that included a literature review and case studies. The results of the analysis show that the existing legal regulations are not yet effective in preventing over-exploitation of fishery resources and do not provide incentives for quality management of fishery resources. Therefore, efforts are needed to optimize the role of law in the management of fishery resources in order to maintain the sustainability of fishery resources and strengthen economic development. The results of the study show that the role of law is very important in the management of fishery resources in Indonesia. The recommendations provided include improving existing legal regulations and developing an*

*incentive system for quality management of fishery resources. Implementation of these recommendations is expected to maintain the sustainability of fisheries resources and strengthen economic development.*

**Keywords:** *Law, Fishery Resources, Management, Indonesia, Analysis.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah perairan sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>, yang mencakup wilayah laut dalam dan laut lepas (Ministry of Marine Affairs and Fisheries, 2020). Sumberdaya perikanan di Indonesia sangat melimpah, yang meliputi berbagai jenis ikan, udang, kerang, dan sumberdaya perikanan lainnya (Sudirman, 2018). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perikanan memberikan sumbangan signifikan bagi perekonomian nasional, dengan nilai produksi perikanan sebesar Rp. 144,9 triliun pada tahun 2019 (BPS, 2020).

Namun, meskipun sumberdaya perikanan di Indonesia sangat melimpah, praktik perikanan yang tidak berkelanjutan dan overfishing seringkali terjadi (Suhardi, 2016). Hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan dan membahayakan keseimbangan ekosistem laut (Kartika, 2019). Oleh karena itu, penting untuk mengelola sumberdaya perikanan dengan bijak dan berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan sumberdaya perikanan di masa depan (Ministry of Marine Affairs and Fisheries, 2020).

Hukum dapat memainkan peran penting dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, dengan memberikan regulasi dan pengawasan

terhadap praktik perikanan yang merugikan dan memastikan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan (Fauzia & Abdul, 2019). Ada beberapa kebijakan dan regulasi hukum perikanan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Ministry of Marine Affairs and Fisheries, 2020).

Pada implementasi hukum perikanan di Indonesia seringkali belum efektif dalam mencegah praktik perikanan yang merugikan dan memastikan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan (Suhardi, 2016). Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi peran hukum dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia dan untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam implementasi hukum perikanan.

## TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan hukum perikanan di Indonesia berkaitan erat dengan permasalahan pengelolaan sumberdaya perikanan yang semakin meningkat. Menurut Fauzia dan Abdul (2019), keterbatasan pengawasan dan pemeriksaan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan menyebabkan banyak tindakan

merusak lingkungan dan sumberdaya perikanan yang dilakukan oleh nelayan dan industri perikanan.

Kartika (2019) menjelaskan bahwa overfishing merupakan salah satu masalah utama dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia. Overfishing menyebabkan terjadinya kekurangan sumberdaya perikanan yang dapat berpengaruh pada ketahanan ekosistem dan ekonomi masyarakat.

Menurut Suhardi (2016), peran hukum sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Hukum dapat membantu membatasi tindakan merusak lingkungan dan sumberdaya perikanan melalui sanksi yang diterapkan. Selain itu, hukum juga dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan program pengelolaan sumberdaya perikanan yang lebih baik.

Berdasarkan informasi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa peran hukum sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia. Namun, permasalahan overfishing dan keterbatasan pengawasan masih menjadi hambatan dalam pengembangan hukum perikanan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mengenai peran hukum dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia.

### **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data mengenai peran hukum

dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia.

Sumber informasi yang digunakan adalah jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku yang berhubungan dengan hukum perikanan dan pengelolaan sumberdaya perikanan. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis data yang terkait dengan peran hukum dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan informasi dan data menjadi beberapa kategori yang sesuai dengan tema penelitian. Kemudian, data dianalisis untuk mengetahui peran hukum dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia.

Metodologi ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data mengenai peran hukum dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data secara luas dan mendalam sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang peran hukum dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia.

Selain itu, studi literatur juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan dan mengkaji berbagai sumber informasi dan data yang ada, sehingga dapat memperoleh gambaran yang objektif dan akurat mengenai peran hukum dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti akan melakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi

sumber meliputi penggunaan berbagai sumber informasi dan data, seperti jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan hukum perikanan dan pengelolaan sumberdaya perikanan. Triangulasi metode meliputi penggunaan metode studi literatur dan analisis data yang berbeda-beda untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

### PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan dibahas hasil analisis data yang diperoleh dari studi literatur dan dianalisis mengenai peran hukum dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan membandingkan dan mengkaji informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan hukum perikanan dan pengelolaan sumberdaya perikanan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia. Hukum membantu mengatur dan mengendalikan aktivitas perikanan, sehingga dapat memastikan bahwa sumberdaya perikanan tidak terdegradasi dan dapat terkelola dengan baik. Hukum juga membantu menjamin bahwa aktivitas perikanan dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal dan memastikan bahwa sumberdaya perikanan dapat terus terjaga dan dikembangkan.

Selain itu, hukum juga memegang peran penting dalam menentukan hak-hak dan kewajiban pengelola sumberdaya perikanan, sehingga dapat memastikan bahwa pengelola sumberdaya perikanan dapat melakukan aktivitas secara efektif dan efisien. Hukum juga membantu menjamin bahwa pengelola sumberdaya perikanan dapat melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas perikanan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa hukum memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia. Hukum membantu memastikan bahwa aktivitas perikanan dilakukan secara adil, efektif, dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal dan memastikan bahwa sumberdaya perikanan dapat terus terjaga dan dikembangkan.

Dari hasil analisis tantangan dan hambatan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan hukum perikanan di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi tantangan antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang hukum perikanan.
2. Belum adanya sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar hukum perikanan.
3. Belum adanya koordinasi yang efektif antar instansi yang berhubungan dengan hukum perikanan.
4. Belum adanya mekanisme pemantauan dan pengawasan yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya yang konsisten dan berkesinambungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sosialisasi dan edukasi tentang hukum perikanan, memperkuat sanksi bagi pelaku yang melanggar hukum perikanan, memperkuat koordinasi antar instansi yang berhubungan dengan hukum perikanan, dan memperkuat mekanisme pemantauan dan pengawasan.

Rekomendasi yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Solusi dan rekomendasi yang dapat diambil antara lain:

1. Peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang hukum perikanan.
2. Penegakan hukum yang lebih tegas bagi pelaku yang melanggar hukum perikanan.
3. Peningkatan koordinasi antar instansi yang berhubungan dengan hukum perikanan.
4. Peningkatan mekanisme pemantauan dan pengawasan.

Dengan demikian, upaya-upaya dan solusi-solusi tersebut akan membantu mengatasi tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan hukum perikanan di Indonesia, sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas perikanan dapat berlangsung secara adil, efektif, dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan hukum perikanan di Indonesia, seperti kurangnya sosialisasi dan edukasi, belum adanya sanksi yang tegas, belum adanya koordinasi yang efektif antar instansi, dan belum adanya mekanisme pemantauan dan pengawasan yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan solusi dan rekomendasi yang tepat, seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi, penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan koordinasi antar instansi, dan peningkatan mekanisme pemantauan dan pengawasan.

Berdasarkan hal tersebut, maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlunya sosialisasi dan edukasi yang konsisten dan berkesinambungan tentang hukum perikanan.
2. Perlunya penegakan hukum yang lebih tegas bagi pelaku yang melanggar hukum perikanan.
3. Perlunya koordinasi yang lebih efektif antar instansi yang berhubungan dengan hukum perikanan.
4. Perlunya peningkatan mekanisme pemantauan dan pengawasan yang efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Fauzia, N., & Abdul, R. (2019). The Implementation of Fishery Law in Indonesia and Its Contribution to Sustainable Fishery Management. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(11), 598-604.
- Hasan, M. (2019). Penerapan Hukum Perikanan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartika, R. (2019). Overfishing in Indonesia: A Review. *Journal of Marine Science and Technology*, 3(2), 105-109.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 9 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum Perikanan.
- Ministry of Marine Affairs and Fisheries. (2020). Regulations and Policies on Fisheries Management in Indonesia. Retrieved from <https://kkp.go.id/en/regulation-and-policy/regulation-and-policy-on-fisheries-management-in-indonesia>
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.
- Prasetyo, B. (2020). Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Rahardjo, M. (2008). Hukum dan Ekologi Perikanan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soemarwoto, O. (2002). Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Soeparman, E. (2015). Hukum dan Pembangunan Sumberdaya Perikanan. Jakarta: Penerbit Buku Kanisius.
- Soeprihanto, R. (2018). Hukum dan Perlindungan Sumberdaya Perikanan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudaryanto, A. (2017). Manajemen Sumberdaya Perikanan Berbasis Hukum. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sudirman. (2018). The Importance of Fishery Resources for Indonesia's Economic Development. *Journal of Economics and Development Studies*, 6(1), 43-48.
- Suhardi. (2016). The Role of Law in Sustainable Fishery Management in Indonesia. *Journal of Social and Political Sciences*, 2(1), 1-7.
- Sutomo, A. (2005). Sumberdaya Perikanan dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Penerbit Buku Erlangga.
- UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- UU No. 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan sumber daya ikan.
- UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Widodo, A. (2010). Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Penerbit Buku Gramedia.